

TESIS

**KEKUATAN BAKAL CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018**



OLEH

YULIUS JEMRI BERUATYAAN

P4300216402

**PROGRAM PASCASARJANA
KONSENTRASI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

HALAMAN JUDUL

**KEKUATAN BAKAL CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

OLEH

**YULIUS JEMRI BERUATYAAN
P4300216402**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
KONSENTRASI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

TESIS

**KEKUATAN BAKAL CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018**

Disusun dan diajukan oleh
YULIUS JEMRI BERUATJAAN
Nomor Pokok P4300216402

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **06 Agustus 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.

Ketua



Dr. A. m. Rusli, M.Si.

Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Armin, M.Si.



ABSTRAK

YULIUS JEMRI BERUATYAAN. *Kekuatan Bakal Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018* (dibimbing oleh Gustiana A. Kambo dan H.A.M. Rusli).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan kekuatan politik yang dilakukan oleh calon bupati untuk ikut pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kekuatan politik pada bakal calon masing-masing dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan pendekatan birokrasi merupakan salah satu unsur untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu bakal calon karena melihat kebijakan dan kinerja yang berdampak langsung di masyarakat, sedangkan pemanfaatan partai politik tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh bakal calon masing-masing karena kinerja anggota DPR yang merupakan interpretasi dari partai politik kurang memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat. Pemanfaatan kekuatan bakal calon masing-masing sebagai tokoh adat dan tokoh agama terbatas digunakan karena hanya untuk mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kata kunci: kekuatan, pemilihan kepala daerah, Maluku Tenggara



ABSTRACT

YULIUS JEMRI BERUATYAAN. *The Strength of Candidates in the Election of the Regional Heads in Southeast Maluku Regency in 2018* (supervised by **Gustiana A. Kambo and H.A.M. Rusli**)

This research aimed to investigate the utility of the political power used by the Regent Candidate joining in the election of regional heads in Southeast Maluku Regency in 2018.

The research used the qualitative approach, and the research type was descriptive qualitative.

The research results indicated that the use of the political strength by each candidate in the election of the regional head in Southeast Maluku Regency used the bureaucratic approach which was one of the elements to direct the community to vote one candidate because they had found that the policies and performance that directly impacted the community, while the use of the political parties was not fully utilized by each prospective candidate because the performance of the members of the People Representative (DPR) had not show any significant impact to the community. The utility of the strength of each candidate as the traditional figure and religious figure was only used limitedly in order to prevent conflict in the midst of society.

Keywords: *Strength, Election of Regional Heads, Southeast Maluku*



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah-nya sehingga penulis Tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian studi dan guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu politik Sekolah Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Untuk itu penulis dengan segala kekurangan mencoba menyusun Tesis dengan Judul: **“Kekuatan Bakal Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, olehnya itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun untuk perbaikan dalam penulis Tesis ini. Selama melakukan penelitian dan penulis Tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., selaku pembimbing I Tesis.
2. Dr. A.M. Rusli, M.Si. selaku pembimbing II Tesis.
3. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.si., selaku penguji sidang Tesis.
4. Prof. Dr. Muhammad, M.si., selaku penguji sidang Tesis.
5. Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA. selaku penguji sidang Tesis.

6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin Angkatan 2016, terkhusus buat rekan-rekan Tata Kelola Politik Lokal.
7. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Aris Beruatjaan dan Mince Beruatwarin atas kesebaran, motivasi, dan do”a yang selalu diberikan kepada penulis selama menempu studi dan menyelesaikan Tesis ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya.

Mengingat kesempurnaan merupakan hasil akhir yang selalu diharapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Tuhan memberkati kita, Amin

Makassar, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penulisan	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kegunaan Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Konsep Kekuatan Politik	15
2.2. Teori Elit	29
2.3. Pemahaman Tentang Elit Lokal	39
a. Elit Birokrasi	39
b. Elit Partai Politik	40
c. Elit Ekonomi	42
d. Elit Agama	44
e. Elit Sipil	45
2.4. Konsep Aktor	46
2.5. Penelitian Terdahulu	48
2.6. Karangka Pemikiran	49
2.7. Skema Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Tipe dan Dasar Penelitian	51

3.2. Lokasi Penelitian	51
3.3. Penetapan Informan.....	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Wawancara mendalam	53
2. Studi pustaka dan dokumen	53
3.5. Jenis Data	54
3.6. Teknik Analisa Data	55
1. Reduksi data.....	56
2. Penyajian data	56
3. Penarikan kesimpulan.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	59
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara.....	59
1. Penduduk dan daftar pemilih tetap	59
2. Pemerintah	61
3. Pendidikan.....	63
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	65
5.1. Pemanfaatan Kekuatan Politik Oleh Bakal Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.....	65
1. Pemanfaatan Elit Birokrasi.....	66
2. Pemanfaatan Elit Partai politik.....	70
3. Pemanfaatan Modal Ekonomi.....	72
5.2. Pemanfaatan Kekuatan Politik dengan Orientasi Kelompok Kepentingan.....	75
BAB VI PENUTUP	104
5.3. Kesimpulan	104
5.4. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir.....	50
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu kepemimpinan nasional menjadi penting guna mengukur posisi elit partai yang akan maju atau elit di luar partai politik yang dijagokan oleh partai. Walau demikian, elit di luar partai juga termasuk elit dalam tingkatan kelas sosial dalam strata masyarakat.

Elit dalam pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam suatu pemilihan umum. Dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan konsep kekuasaan. Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya. Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit. Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik.

Beberapa hal yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut. Keinginan merebut kekuasaan dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik antar elite di dunia politik.

Pemusatan atau pergerakan massa yang dilakukan oleh pemusatan kekuatan oleh elit-elit politik yang mempunyai kepentingan terhadap daerah tersebut. Dalam kasus ini elit mencoba untuk memberikan strategi yang sangat menguntungkan dari otonomi daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur tidak percaya pada negara, bagi mereka yang terbukti gagal dalam banyak hal.⁷

Demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah.⁸ Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui

⁷ Henk Schulte nordholt dan Gerry van klinken. 2014. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 595

⁸ Rudini, H, Atas Nama Demokrasi Indonesia, Jakarta, 1994, hal.6-7

pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas, diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Bagi J Kristiadi, pemilu demokratis adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab.⁹

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Elit lokal tumbuh subur di dalam masyarakat "mirip jaringan" yang digambarkan sebagai sekumpulan campuran (*melange*) organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri dengan kontrol sosial yang efektif terpecah-pecah. Pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, menurut dugaan, acapkali diakui melebur dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar.

Elit lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan "strategi bertahan hidup" penduduk

⁹ Hanif Suranto, *Kritis Meliput Pemilu*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2009, hal. 2

setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah "personalisme", "klientisme", dan "hubungan patron-klien". Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka.

Elit lokal memasuki lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintang atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Orang kuat lokal membatasi otonomi dan kapasitas negara, penyebab kelemahan negara "dalam menjalankan tujuan berorientasi perubahan sosial, serta memperbesar ketakterkendalian dan kekacauan. Sepanjang keberhasilan strategi industrialisasi dan pertumbuhan amat tergantung pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara yang saling bertautan efektif.

Elit lokal sangat mungkin memperoleh pembatasan (*constraining*) atau pemberdayaan (*enabling*) dari struktur (*structure*). Struktur yang ada terbuka kemungkinan untuk dimaknai secara berbeda oleh elit politik lokal yang berasal dari berbagai kalangan. Elit politik lokal dari kalangan tertentu dapat memberi makna struktur yang ada sebagai pembatasan;

namun bagi elit politik lokal dari kalangan berbeda struktur tersebut dimaknai sebagai pemberdayaan.

Elit lokal yang dimaksud adalah mereka yang menduduki posisi jabatan politik di ranah lokal. Perjalanan sejarah mencatat bahwa posisi mereka sebagai elit politik lokal mengalami 'pasang naik' dan 'pasang surut' paralel dengan perubahan yang terjadi. Mereka yang pada rentang waktu tertentu mengalami pembatasan dari struktur yang ada, berubah nasibnya menjadi mengalami pemberdayaan pada kurun waktu yang lain. Demikian pula ada diantara mereka yang semula mengalami pemberdayaan berubah menjadi mengalami pembatasan dari struktur.

Pengaruh kekuatan elit lokal bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi elit lokal bersama aparat birokrasi negara di tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. Elit lokal berhasil menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit dan pekerjaan. Elit lokal memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. Elit lokal juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat.

Interaksi kekuasaan antar elit di tingkat lokal terutama di wilayah kabupaten terdapat beberapa kesamaan pandangan tentang kekuasaan dianggap relevan. Setidaknya ada dua hal yang harus dianalisis. Pertama, aktivitas politik setiap elit atau kelompok elit dalam memperebutkan

sumber-sumber, posisi, dan jabatan yang langka dalam masyarakat. Kedua, dalam memperebutkan kekuasaan politik, elit atau kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik atau konsensus. Di satu sisi, elit akan menghadapi perbedaan, persaingan, dan pertentangan dengan elit politik lainnya. Namun, di sisi lain juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara elit politik.

Hasil survei Media Riset Strategi Bedah Nusantara pra deklarasi menunjukkan tingkat pengenalan bakal calon Bupati Maluku Tenggara diduduki oleh M.Thaher Hanubun dengan persentase 83.90 persen, sedangkan tingkat kesukaan itu menempati posisi ketiga yakni 82.09 persen. Bukan hanya itu, Petrus Beruatwarin pada posisi kedua tingkat pengenalan dengan persentase 81.17 persen, sedangkan untuk tingkat kesukaan 83.95 persen. Di posisi lain nama Thedeus Welerubun ada di posisi akhir dengan persentase 80.92 persen sedangkan tingkat kesukaan berada di posisi 67.49 persen.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa beberapa tokoh telah mendeklarasikan diri akan ikut serta sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2018, mereka diantaranya M. Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin, Eusebius Utah Safsafubun-Rahman Matdoan, Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan.

¹⁰ <http://www.mrsbedahnusantara.com> diakses ada tanggal 2 Desember 2017.

Setelah terbentuknya hukum larwul ngabal dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat di kepulauan Kei, dimana pememimpin yang tertinggi dipegang oleh seorang rat (raja) yang memiliki daerah kekuasaan meliputi beberapa ohoi yang dipimpin oleh seorang halaai. Pada fase ini tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang telah teratur serta memiliki rasa solider yang tinggi terhadap orang lain. Perilaku hidup yang menghargai hak-hak kemanusiaan orang lain menjadi realitas yang terwujud dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam perilaku hidup masyarakat ketetapan-ketetapan hukum larwul ngabal menjadi rujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan lebih baik. Masuknya bangsa Eropa di Kepulauan Kei memberikan dampak yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei.

Salah satu hal yang cukup mendapat pengaruh ialah sistem pemerintahan adat. Kepentingan politik untuk mencari keuntungan di setiap daerah jajahan menimbulkan berbagai kebijakan yang di pandang mendatangkan keuntungan bagi pihak penjajah. Perubahan yang cukup mendasar ialah perubahan pada nama kepemimpinan yang pada mulanya dipegang oleh seorang halaai diganti menjadi rat (raja). Untuk mendapatkan dukungan dari pihak masyarakat. Kebijakan lain yang ditempuh oleh Belanda ialah menggantikan raja-raja yang dianggap tidak berpihak kepada Belanda, sedangkan raja-raja dan orang kaya

yangmenyatakann dukunganya kepada Belanda diberikan kesempatan untuk memimpin masyarakatnya. Untuk memudahkan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat dan pemerintahan di Kei, Belanda membagi wilayah Kepulauan Kei dalam tujuh belas Ratschap yang masing-masing Ratschap di pimpin oleh seorang raja atau orang kaya yang dianggap dapat membatu pihak Belanda.

Kehadiran para pendatang di Kepulauan Kei mampu mengeser keberadaan penduduk asli sebagai penguasa. Karisma yang dimiliki oleh para pendatang dengan membawa berbagai peralatan yang dianggap sakral turut memberikan pengaruh bagi para pendatang untuk mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Keahlian, kepiawaian dan kelicikan pendatang menimbulkan rasa hormat dan kepatuhan yang sangat besar, hal inilah yang kemudian memberikan ruang terjadinya proses stratifikasi sosial (pelapisan sosial). Pelapisan sosial dalam masyarakat adat di Kepulauan Kei sesungguhnya merupakan suatu migrasi budaya yang dibawah oleh nenek moyang mereka yang datang dari Bali.

Munculnyastratifikasi sosial khususnya dalam kehidupan masyarakat Tual disebabkan karena adanya pembagian hak, kekuasaan dan kewajiban antara penduduk asli dan warga pendatang. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Tual pada umumnya dikenal dengan istilah sistim kasta yang diikelompokan pada tiga kelompok kasta yaitu:

1. Golongan Mel-mel
2. Golonngan Ren-ren
3. Golongan Ri-ri

Kekuatan politik sementara yang dibangun oleh M.Thaher Hanubun adalah kekuatan partai politik dan aktor politik sehingga menjadikan beliau sebagai salah satu elit ekonomi dan elit sipil, dilatarbelakangi karena beliau merupakan seorang pendidik dan sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam rangka mendukung perolehan suara, beliau mendeklarasikan diri bersama Petrus Beruatwarin sebagai calon wakil bupati dikarenakan Petrus Beruatwarin merupakan seorang figur yang berpengalaman di bidang birokrasi dan saat ini berprofesi sebagai Sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga secara langsung kekuatan politik yang digunakan adalah kekuatan politik birokrasi dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan dari aparatur sipil daerah kabupaten Maluku Tenggara, serta merupakan seorang pendidikan, sebagai penggagas awal terbentuknya Politeknik Perikanan Negeri Tual, sehingga untuk memperoleh kemenangan maka kekuatan elit yang digunakan oleh M. Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin adalah kekuatan elit ekonomi, elit sipil dan elit birokrasi. Partai pengusung yakni, Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN). dan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS). Kolaborasi kekuatan politik yang digunakan oleh pasangan tersebut adalah kekuatan partai politik, aktor politik dan birokrasi.

Eusabius Utah Safsafubun merupakan politisi yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan merupakan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara sehingga kekuatan politik sementara yang digunakan oleh beliau adalah kekuatan partai politik dan aktor politik, dalam menghadapi pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara, beliau mendeklarasikan diri bersama Rahman Matdoan sebagai bakal calon wakil bupati karena Rahman Matdoan adalah seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan merupakan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk memperoleh kemenangan, Kekuatan politik yang digunakan oleh pasangan ini yakni, kekuatan partai politik dan aktor politik dengan menggunakan pendekatan kekuatan elit partai dan kekuatan elit sipil. partai yang pengusung Eusebius Utah Safsafubun-Rahman Matdoan yakni, Partai Persatuan Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Demokrat.

Angelius Renyaan merupakan salah satu figur yang kini bertugas pada bagian otonomi daerah kantor gubernur Maluku dan pernah menjabat sebagai pelaksana tugas bupati di Kabupaten Maluku Barat

Daya (MBD) serta Pulau Aru Dobo yang membuat beliau memiliki kekuatan elit birokrasi. Hamza Raya merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan latar belakang dari pasangan tersebut maka kekuatan politik sementara yang digunakan untuk memperoleh kemenangan pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara yaitu kekuatan partai politik, aktor politik dan birokrasi. Partai pengusung yakni Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan, yakni Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang **“Kekuatan Bakal Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.”**

1.2. Rumusan Masalah

Pertarungan politik pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara semua kandidat telah mempersiapkan strategi politiknya dalam memenangkan pemilu kepala daerah. Salah satunya dalam mendekati figur-figur yang dianggap memegang peranan sentral dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam suatu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bakal calon memanfaatkan kekuatan politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan kekuatan politik yang dilakukan oleh calon bupati untuk ikut pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu politik pada umumnya dan politik lokal pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang politik serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang politik sebagai bekal untuk menegakkan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam berdemokrasi;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai kekuatan elite politik terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai kontribusi bagi Ilmu Politik dalam bidang pengambilan kebijakan pemerintah kota, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.

1. Kegunaan Praktis penelitian ini adalah agar dapat digunakan dalam menerapkan kekuatan elite politik terhadap pemilihan kepala daerah kebid tingkat daerah provinsi hingga tingkat nasional.
2. Kegunaan Teoritis penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan acuan teoritis bagi peneliti dengan topik politik lokal, khususnya kajian politik lokal yang mengkaji pembedaan kekuatan elit lokal dalam menghadapi pemilihan kepala daerah..

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika tulisan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang elit lokal Indonesia dan mengerucut pada pengaruh elit lokal dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara; Pengaruh elit lokal yang malatarbelakangi calon kepala daerah; rumusan masalah; serta tujuan dan kegunaan penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi konsep kekuatan politik, teori elit, pemahaman tentang elit lokal dan konsep aktor.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisi lokasi wilayah penelitian yaitu di Kabupaten Maluku Tenggara; jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif; jenis data berupa data primer dan data sekunder; sumber data yang diperoleh melalui wawancara beberapa informan; teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara; serta teknik analisis data.
4. BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, bab ini menguraikan dua aspek secara umum, yaitu gambaran umum Kabupaten Maluku Tenggara dan elit politik Maluku Tenggara.
5. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan data-data yang diperoleh dari proses penelitian baik melalui penelitian langsung maupun studi pustaka. Pada bab ini juga penulis mengelaborasi konsep kekuatan politik dan teori elit yang disertai dengan pemahaman mengenai elit lokal dan aktor politik yang terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga melatarbelakangi tiga orang figur untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.
6. BAB VI PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan konsep dan teori yang membantu proses penelitian ini, dalam rangka menghasilkan penelitian secara utuh dan memiliki tingkat akurasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Konsep dan teori yang dimaksud adalah konsep kekuatan politik, konsep elit politik, konsep aktor politik dan konsep pemilihan umum kepala daerah.

2.1 Konsep Kekuatan Politik

Dalam ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan kekuatan (*power*) antara lain: *Influence* atau pengaruh, yaitu bagaimana seseorang mampu mempengaruhi orang lain berubah secara sukarela. *Persuasi* yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi. *Manipulasi* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaruhi tidak menyadari. *Coersion* adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan. *Show Of Force* yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan senjata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.

Kekuatan diartikan sebagai penggunaan tekanan nonfisik dalam diri manusia guna mempengaruhi orang lain. Menurut Hannah Arendt, kekuatan (streght) adalah sifat atau karakter yang dimiliki setiap individu.¹¹

Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaannya dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain, karena itu kekuatan dapat dipengaruhi. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang bisa mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang.

Kekuasaan dan kekuatan hampir tidak dapat dibedakan karena memiliki makna yang saling berkaitan. Kekuasaan yang dikemukakan oleh Abraham Kaplan yaitu suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.¹² Walaupun “kekuatan” dan “kekuasaan” sering dipakai dalam arti yang sama, namun sebagian besar analisis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih luas dan melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam dengan berbagai aspek yang mendukungnya.

¹¹ Universitas Sumatera Utara, Kekuatan Politik dan Proses Politik, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16219/4/Chapter%201.pdf>, pada tanggal 27 Januari 2018.

¹² Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 60.

Kemampuan yang dimiliki pemimpin, maka ia dapat mempengaruhi atau mengendalikan masyarakat sehingga masyarakat sebagai yang diperintah memiliki keterbatasan dalam bertindak berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain sehingga ikut terlibat dalam tindakan yang diarahkan oleh pelaku dikonseptualisasikan sebagai kekuasaan. Dalam konteks tersebut, hubungan kekuasaan adalah suatu produk dari hubungan-hubungan kekuatan yang muncul dari pelaku, meliputi pelaku yang menguasai dan yang dikuasai.

Pengertian politik adalah kata yang mempunyai banyak arti. Kata "politik" berasal dari bahasa Yunani "polis" yang diartikan sebagai negara kota. Hakekatnya politik adalah seni atau ilmu memerintah. Sedangkan pengertian politik menurut Miriam Budiardjo adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem politik atau negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu, disamping bagaimana cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian kekuatan politik adalah kemampuan untuk membentuk, mengendalikan, dan mempengaruhi perilaku politik orang lain serta untuk memimpin dan membimbing perilaku mereka ke arah yang diinginkan oleh orang, kelompok, atau lembaga yang memegang kekuasaan politik.

Kekuatan politik merupakan aktor-aktor maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bakhtiar Effendi mengemukakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik.¹³

Kekuatan politik saling berinteraksi dalam sebuah sistem politik. Pada dasarnya merupakan unit-unit politik yang turut membentuk struktur politik. Dalam perspektif behaviorisme, individu ditempatkan sebagai unit terkecil dalam sebuah sistem politik, terutama individu-individu yang berkedudukan sebagai pemimpin politik. Dalam sistem politik, unit-unit politik ini yang membentuk sistem politik dapat berwujud menjadi tindakan politik, yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat.¹⁴

Kekuatan politik dapat mengorganisasikan diri dalam berbagai bentuk kekuatan politik yang lebih memungkinkan untuk berkontestasi dengan kekuatan politik lain, baik dalam perebutan sumber ekonomi maupun kekuasaan politik. Pengorganisasian kekuatan politik dapat mewujudkan dalam civil society seperti LSM atau organisasi kemahasiswaan, *political society* seperti partai politik atau

¹³ Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. (Jakarta : 1989)

¹⁴ Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia* (Bandung : 2013).

birokrasi, dan *economical society* seperti pemilik modal atau organisasi bisnis.

Miriam Budiarjo Mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian Individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi- pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambil keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembagakan dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik.¹⁵

Baktiar Effendi Mengemukakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik. Beliau juga membagi kekuatan politik menjadi dua subbagian besar, yakni kekuatan politik formal dan kekuatan politik nonformal.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 58.

¹⁶ Perbandingan Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru Dengan Era Reformasi” oleh KIKI NAMIRA diakses pada 26 Desember 2017 di <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14868>.

1. Fungsi Kekuatan Politik

Kekuatan politik adalah segala sumber daya politik yang digunakan seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi kekuatan politik yaitu :

- a. Mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai jalannya kebijakan tersebut.
- b. Keseimbangan kekuatan.
- c. Agregator dan artikulator kepentingan.

Jeffrey A Winters, menyebutkan bahwa kekuatan politik dipengaruhi oleh:¹⁷

a. Kekayaan (financial)

Kekuatan politik yang bersumber dari kekayaan (financial) adalah faktor yang paling dominan dalam pembentukan kekuatan politik aktor. Kekuatan finansial tentunya sangat berperan terutama pada masa kampanye. Setiap orang yang mengikuti pemilihan umum tentunya harus mempunyai kekuatan ini. Sangatlah mustahil jika kekuatan ini tidak berpengaruh dalam kampanye. Aktor-aktor politik dalam menjalankan kehidupan perpolitikannya akan sangat baik jika ia didukung oleh pengusaha. Tentunya dalam konteks Indonesia, hubungan antara penguasa dan pengusaha tidak dapat dihindarkan.

¹⁷ [kekuatan-kekuatan-politik- indonesia-di.html](#), diakses tanggal 26 Januari 2018.

Orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah sebagai hasil dari kesuksesan dalam berbisnis menjadi hal yang sangat menunjang ketika mereka terjun di dunia politik. Adapun posisi pebisnis dalam konteks karir politik, Max Weber berpandangan bahwa pebisnis memiliki status yang lebih tinggi daripada akademisi. Mereka dapat menguasai keuangan atau harta kekayaan. Karena politik butuh uang atau kekayaan, para pebisnis dapat membiayai roda politiknya, bukan sebaliknya politik yang membiayai aktivitas aktor politiknya.

Status sosial yang lebih tinggi, pada gilirannya pebisnis sukses mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat. Mereka cenderung lebih mudah dan leluasa terlibat dalam aktivitas politik. Tentunya politik Indonesia dan arah politik yang sedang bergulir di Indonesia sampai saat ini masih cenderung dikendalikan oleh kekuatan finansial yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Banyak kasus yang telah menunjukkan bahwa kekuatan finansial masih sangat menentukan arah serta kebijakan politik, khususnya dalam partai politik.

b. Jabatan

Kekuatan politik juga dipengaruhi oleh jabatan selain kekuatan finansial. Jabatan dapat mempengaruhi atau membentuk citra politik seseorang sehingga bisa mengkonstruk

pilihan masyarakat dan persepsi masyarakat. Seorang yang memiliki jabatan bisa saja memanfaatkan jabatan dan kepopulerannya untuk mendapatkan kekuasaan dan hal ini menjadi kekuatan politiknya.

Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan. Oleh karena itu jabatan yang dimiliki seseorang menjadi kekuatan politiknya untuk mendapatkan kekuasaan. Misalnya pada masa Orde Baru, jabatan yang dipegang oleh mantan Presiden Soeharto sebagai panglima tertinggi. Dengan jabatan yang dimiliki Presiden membuat pemusatan kekuasaan terjadi pada masa tersebut. Selain itu, kepatuhan ABRI terhadap hierarki komando yaitu Presiden Soeharto membuat kekuasaannya semakin kuat. Jabatan struktural yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh terhadap dukungan-dukungan dari masyarakat.

c. Popularitas

Kekuatan politik yang dibentuk karena popularitas adalah hal yang paling baik. Popularitas yang diciptakan dari citra-citra politik akan bisa mengkonstruksi masyarakat untuk mendukung ataupun tidak mendukung seseorang. Popularitas dalam hal ini seperti keturunan (ikatan keluarga), jabatan, pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui. Seorang pemimpin yang memiliki popularitas biasanya karena memiliki suatu hal yang

berasal dari dalam dirinya yaitu kharisma. Popularitas jika disatukan dengan kharisma dan wibawa dikarenakan kharisma dan wibawa akan efektif jika keberadaan calon yang bersangkutan dikenal sebagai seorang yang kharismatik dan berwibawa.

Keturunan seorang sangat berkaitan dengan popularitas. Semakin tinggi keturunan seorang aktor atau calon, maka semakin besar pula popularitas yang ia peroleh. Keturunan adalah salah satu faktor pendukung kekuatan politik yang ampuh dalam memenangkan suara jika dilihat dalam konteks Indonesia, khususnya di daerah. Semakin populer garis keturunan seorang calon, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.

Keturunan merupakan salah satu faktor keturunan dalam meraih suara dalam pemilihan-pemilihan di tingkat daerah adalah hal yang lumrah terjadi. Secara umum masih ada pemimpin-pemimpin di tingkat daerah yang terpilih karena faktor ini, apakah dia dari golongan bangsawan ataukah dia terpilih sebagai penerus kekuasaan di daerahnya. Tentunya hal ini tergantung pada budaya-budaya masyarakat di tempat tersebut, begitupun dengan faktor kepala suku. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan pilihan masyarakat karena masyarakat di beberapa daerah umumnya

percaya dan yakin kepada petuah atau kepala adat sehingga pilihan mereka tergantung kepada kepala adat.

d. Kekuatan mobilisasi

Mobilisasi politik adalah hal yang biasa terjadi pada sistem politik apapun. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan massa, baik sadar maupun tidak, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendesak sebuah kelompok politik (partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi-asosiasi sipil tertentu). Mobilisasi tidak mengindahkan besaran ruang pengambilan keputusan, kehadiran partisipan, dan juga kontrol atas keputusan politik yang ada. Kandidat yang pandai dalam menggerakkan suara massa sehingga beralih kepada dirinya akan memperoleh kekuasaan.

Cara ini ditunjukkan juga pada masa Orde Baru, karena jabatan mantan Presiden Soeharto sebagai panglima tertinggi di ABRI. Militer yang pada idealnya harus bersikap profesional dan selalu bersikap tidak memihak atau netral dalam politik, ternyata telah dimobilisasi dan dimanipulasi oleh Soeharto untuk memihak pada kelompok tertentu.¹⁸

¹⁸*Ibid*, Hlm. 88.

e. Cara-cara kekerasan

Faktor pendukung terakhir adalah paksaan. Cara ini dilakukan dengan menimbulkan ketakutan kepada masyarakat sehingga mereka tunduk dan patuh kepada si pelaku. Cara-cara ini sudah hampir tidak ditemukan di Indonesia seiring dengan terbukanya kesempatan dan hak-hak kepada masyarakat dalam memilih pilihannya.

Cara-cara ini dilakukan oleh ABRI pada masa Orde Baru. Mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan demi ketertiban dan keselamatan umum. Tindakan-tindakan ini sebagai kekuatan hankam dan juga sebagai kekuatan politik.

Arena kontestasi politik dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan kompetisi politik tersebut manakala memiliki modalitas yang terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi politik, yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik. Kandidat yang memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Semakin besar kandidat yang mampu mengakumulasi tiga modal, maka semakin berpeluang untuk menang. Peluang terpilihnya kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks. Maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari satu faktor saja

atau modalitas tertentu.¹⁹ Modalitas terbagi atas tiga yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik. Modal-modal tersebut akan diuraikan di bawah ini.

a. Modal Sosial

Modal sosial atau *social capital* merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial yang dikembangkan. Hal ini akan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial. James Coleman mengartikan modal sosial sebagai struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Menurutnya, modal sosial akan lemah apabila terjadi proses-proses yang merusak kekerabatan seperti perpisahan atau perpecahan antarsesama masyarakat. Ketika hal itu terjadi, maka tidak akan ada lagi interaksi sosial yang merupakan pondasi dari modal sosial. Modal sosial sebagai komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, salingpercaya dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus. Setiap individu dapat

¹⁹Tesis, Stella Maria Ignasia Pantouw, *Modalitas Dalam Kontestasi Politik*, Universitas Diponegoro, Semarang 2012. Hlm 15.

bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan kesulitan yang besar. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, dan saling percaya. Termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial. Modal sosial merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru atau kekuatan sosial.

Latar belakang sosial yang dimiliki kandidat bisa dicermati, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya). Hal-hal tersebut merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenang pemilihan, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat, kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

b. Modal Ekonomi

Setiap kandidat dalam kontestasi politik mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, kerana berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai penggerak dan pelumas mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membakar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkan.

Modal politik dan modal ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai Jalur pintas.

c. Modal Politik

Kandidat dalam pemilihan umum memerlukan dukungan politik yang diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemilihan umum. Casey mendefinisikan modal politik sebagai

pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik yang bersangkutan. A.Hick dan J.Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau dikontribusikan terhadap keberhasilan kontestasi dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Banyak terdapat elit-elit dalam kontestasi politik yang menduduki jabatan politik (elit politik) maupun elit yang menduduki jabatan-jabatan strategis (elit nonpolitik) yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut.

2.2 Teori Elit

Pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Berdasarkan studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi di atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Pengertian sosiologis dan politis, elite adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemahkan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya.²⁰

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati,

²⁰ HM, Nasruddin Anshoriy Ch, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm 04

Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.²¹ Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. Dalam sirkulasi elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elite menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.²²

Elite adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para

²¹ S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 203

²² *Ibid.*

pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral, dan sebagainya.

Menurut Karl Marx, elite politik terdapat tiga macam, dimana elite dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: pertama, Metode Posisi, elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode Reputasi, elite politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.

Menurut Keller, elite pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (*non elite*).

Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan

Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.²³

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*).

. Kedua, lapisan rendah (non elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang

²³*Ibid.* Hlm. 34.

didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.²⁴

Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu : (1). Lapisan atas, yaitu elite, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*), dan elit yang tidak memerintah (*non-governing*). (2). Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite.

Konsep pergantian elite juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian: (1). di antar kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri. (2). di antara elite dengan penduduk lainnya.

Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (1). Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada. (2). individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemduain didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite

²⁴ *Ibid.*

sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.²⁵

Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite.

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elite karena tidak memperhatikan bidang

²⁵ *Ibid.* Hlm. 35

interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat.

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elite. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elite itu sendiri, apa lagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan

kepentingan antar elite itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elite.

Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefinisikan elite adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang “hukum besi oligarki”, yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan.

Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elite memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang memiliki atau bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan.

Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Charles F. Andrain²⁶ yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni : sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.

²⁶*Ibid.*Hlm. 38

2.3 Pemahaman Tentang Elit Lokal

Elit lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah elit birokrasi, elit partai politik, elit ekonomi, elit agama, elit masyarakat dan gerakan golput. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki.²⁷

a. elit birokrasi

satu hal yang perlu ditekankan bahwa elit pemerintah di daerah berfungsi sebagai pelayanan masyarakat yang baik (good governance). Terciptanya pemerintahan yang baik dibutuhkan upaya sinkronisasi antara cita-cita desentralisasi melalui otonomi daerah dengan proses demokratisasi di daerah. Dalam alam demokrasi, pejabat negara baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif adalah pelayan bagi rakyat dan bukan juragan. Demikian halnya elit politik dan pejabat negara di daerah. Karenanya, pemerintah daerah harus membuka pintu untuk mendengar aspirasi warga masyarakat.²⁸ Pemerintah daerah harus memberi ruang untuk menampung partisipasi masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya.²⁹

Dalam konteks dan semangat demokrasi, fungsi elit pemerintah lokal dalam konteks tata kelola pemerintah dan pelaksanaan sistem birokrasi, diorientasikan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan

²⁷ Abdul Halim. POLITIK LOKAL, Pola, Aktor dan Alur Dramatisasinya. Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B), 2014. Hlm. 131.

²⁸ Haryanto, otonomi daerah dan perubahan sosial, Hlm 322.

²⁹ *Ibid*

sebaik mungkin terhadap warga dan masyarakat lokal. Orientasi meningkatkan mutu layanan publik, terutama pembangunan masyarakat daerah, meniscayakan elit politik daerah fokus pada pembangunan kapasitas daerah, mengutamakan pembangunan kapasitas infrastruktur. Sebab dalam salah satu contoh keberpihakan dalam pilihan strategis adalah menciptakan keadilan, termasuk dalam pembangunan daerah adalah pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.³⁰

b. Elit Partai Politik

Selanjutnya, konstalasi politik di level lokal juga diikuti oleh elit partai politik di daerah. Keberadaan dan fungsi elit parpol di daerah tidak begitu terasa oleh masyarakat luas, selain hanya meramaikan pemilu setiap lima tahun sekali, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah. Program-program parpol yang berjalan berkelanjutan di daerah tidak begitu terasa di hati masyarakat. Umumnya, para elit parpol terlihat sibuk menjelang pemilu atau pilukada. Dengan demikian, para elit parpol bukan saja kurang berperan dalam pembangunan masyarakat melainkan juga gagal menjadikan parpol instrumen utama pembangunan daerah. Padahal, penguatan partai politik di daerah maupun ditingkat nasional sangatlah penting.

³⁰ Firmansyah, Persaingan, Legitimasi kekuasaan dan marketing politik, pembelajaran politik Pemilu 2009, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Elit parpol didaerah, secara umum, terbagi dua macam. Pertama elit parpol yang berda diparlemen. Kedua, elit parpol yang non parlemen alias sebatas menjadi pengurus partai. Dua elit parpol ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas kerja partai politik. Elit parpol yang bertugas diparlemen harus menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap parpol dapat dipulihkan kembali apabila peran kadernya diparlemen.

Sementara elit partai politik non parlemen, yaitu elit parpol yang tidka duduk di DPR, juga memiliki peran. Peran elit parpol non parlemen sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan politik warga masyarakat. Sebagai elit partai non parlemen, tugas utamanya bukan hanya merekrut dukungan massa melainkan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi yang baik. Dengan demikian, partai plitik menjadi ruang kaderisasi yang dapat mealhirkan intelektual organik. Fungsi ini akan berjalan apabila para elit parpol non parlemen menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik.³¹

³¹ Abdul Halim, *Op. Cit.* Hlm 136

c. Elit ekonomi

Elit ekonomi di daerah memainkan peran strategi dalam politik lokal. Ada tiga kategori peran elit: peran ekonomi di birokrasi, peran elit ekonomi di partai politik dan peran elit ekonomi non politik. Ketiga kategori ini mencerminkan ranah-ranah yang dimasuki oleh para elit ekonomi. Banyak para ekonom yang menjabat jabatan birokrasi, ada yang dipartai politik dan ada pula yang diluar struktur politik namun berpengaruh luas baik di birokrasi maupun partai.

Peran elit ekonomi di birokrasi daerah biasanya, ditunjukkan dengan keinginan mereka untuk menguasai aset-aset daerah, khususnya lahan. Agar mereka bisa aman menguasai aset dan lahan di daerah, para elit ekonomi masuk kedalam jaringan birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Birokrasi menjadi jalan paling efektif bagi para ekonomi dalam rangka menguasai sumber daya alam dan tanah daerah.

Dalam sistem politik yang oligarkis dan otoriter, elit ekonomi yang bisa merasuk ke dalam jaringan birokrasi adalah oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan. Dengan pola semacam itu, pemerintah yang ada menjadi pemerintah yang oligarkis-kapitalis. Sebab didalamnya, kekuasaan birokrasi didominasi oleh penguasa diktator dan penguasa kapitalis, gabungan dua kelompok ini melahirkan politik kartel yang oligarkis-kapitalis. Dalam konteks Indonesia, peran elit

ekonomi birokratis ini tercermin dalam pemerintahan orde baru yang dinahkodai oleh Suharto.

Jenis kedua elit ekonomi adalah mereka yang coba menabur cengkaman di dalam partai politik. Sebagai mesin politik maka sebuah partai dana pembiayaan yang tidak sedikit. Karenanya, elit ekonomi menjadi incaran partai-partai politik. Namun, elit ekonomi yang masuk ke dalam partai politik tidak serta merta gratis. Aktivitas mereka di dalam partai, dengan pengeluaran finansial yang besar, merupakan bagian dari aktivitas investasi. Dengan demikian, partai politik menjelma menjadi ladang perusahaan. Para elit ekonomi yang menanamkan sahamnya di partai politik, ujung-ujungnya, turut merebut posisi kekuasaan di birokrasi.

Selain elit ekonomi yang berada di dalam struktur politik, ada pula elit ekonomi di luar struktur ekonomi diluar struktur politik. Begitu juga di daerah, sebagian elit ekonomi berada di luar struktur politik. Elit ekonomi berada diluar struktur politik memainkan peran penting, diantaranya adalah sebagai pengontrol kekuasaan melalui jaringan bisnis dan modal yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi dan perkembangan bisnis mereka. Para elit ekonomi itu memang tidak berambisi untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan.

Peran elit ekonomi non politik, yang mampu mengontrol penguasa, semakin terbuka lebar di era otonomi daerah.³²

d. Elit agama

Para elit agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan kharisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali, dalam sebuah Pilkada, para calon bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-kerumah kiai untuk meminta doa restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh elit agama terhadap masyarakat sangat besar.

Terjunnya elit agama ke kancah perpolitikan menjadikan agama bercampur-campur dengan kepentingan dan aktivitas politik. Dari sanalah lahir politik beraliran agama. Terjunnya tokoh agama juga semarak di daerah, terutama saat rezim Soeharto runtuh. Paska kejatuhan Soeharto, politik berbasis agama muncul bagai cendawan di musim hujan.

Dalam konteks Indonesia, wacana integralisme politik dan agama didengungkan oleh beberapa kelompok keagamaan, yang menghendaki Indonesia menjadi negara Islam. Kelompok-kelompok ini mempunyai banyak cabang di daerah dan umunya menadang NKRI adalah bentuk negara yang belum final.

³² Ibid, Hlm. 143.

Namun, banyak pula elit agama yang berpendapat lain, yang lebih meyakini agama sebagai dasar etika sosial, di mana secara formal harus terpisah dari politik. Sebab, agama yang integral dengan dunia politik dapat menyebabkan nilai-nilai universal agama dimanipulasi dan dipolitisir untuk kepentingan politik praktis. Keterkaitan agama dengan politik, menurut kelompok ini, lebih pada peran agama dalam *high politic* (politik tinggi), yang diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal agama di dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum dalam sistem politik apapun.³³

e. Elit Sipil

Selanjutnya adalah peran elit masyarakat sipil di daerah. Elit masyarakat sipil ini mencakup banyak kategori, seperti elit organisasi keagamaan, pemuka adat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, komunitas petani, komunitas nelayan, pengurus komunitas seni dan kebudayaan dan tokoh-tokoh organisasi lainnya. Para elit sosial masyarakat ini adalah mereka yang berada di luar struktur kekuasaan dan tidak memiliki modal kapital maupun religius untuk mempengaruhi keajakan pemerintahan.

Peran elit sosial dalam masyarakat sangat penting. Mereka lebih dekat dengan masyarakat Pemuka adat, misalnya, jelas

³³ Ibid. Hlm. 147

merupakan pihak yang membawahi sekaligus panutan bagi masyarakat di bawahnya. Karena itu, peran elit masyarakat untuk program-program pembangunan daerah. Sebuah sistem politik yang sehat, salah satunya ditentukan dengan *civil society* yang sehat, sebagai kekuatan kontrol terhadap kekuasaan.

Ada sejumlah nilai yang perlu dilakukan oleh para elit sosial di daerah. Di antaranya adalah menumbuhkan daya pikir kritis masyarakat, terutama menciptakan budaya kritis terhadap pemerintah sebagai representasi kekuasaan negara. Sikap kritis bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat dan bukan justru berbalik menindas rakyat. Isu-isu kesejahteraan, emansipasi, transparansi dan sebagainya harus menjadi isu utama yang diperjuangkan elit masyarakat di daerah, dalam rangka memberikan pendidikan kritis terhadap warga daerah. Tanpa sikap kritis dari masyarakat terhadap warga daerah. Tanpa sikap kritis dari masyarakat maka pihak-pihak yang berkuasa cenderung menyeleweng.³⁴

2.4 Konsep Aktor

Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin *agere*, yang berarti “berbuat, melakukan”. orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, perintis, pencipta, pengarang. *Auctor* merupakan asal-usul untuk

³⁴ Firmanzah, Op.Cit. Hlm. 17

kata Inggris *author* yang kita kenal dalam arti “pengarang” atau “penulis”. Aktor mempunyai arti lebih luas; pembuat atau pelaku. Aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting. Aktor politik adalah manusia terpilih (*the chosen people*). Mereka adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.

Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik.

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang, terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.

Secara sederhana aktor politik mempunyai keunggulan dibandingkan kandidat lain dalam kaitannya dengan kontestasi Pemilu, Levi Strauss mengategorikannya menjadi 4 yakni : Pertama

Modal ekonomi, yang mencakup materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan. Kedua, Modal Kultural/budaya, yang mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Misalnya kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar keserjanaan). Ketiga Modal sosial, menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki aktor (individu atau kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kekuasaan. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Keempat Modal simbolik, mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi atau dengan kata lain ketokohan seorang aktor.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain

Tabel 1. Penelitian terdahulu diolah oleh penulis

Kesimpulan dari kelima karya ilmiah di atas, yaitu menunjukkan bahwa Politik lokal menjadi kekuatan yang sangat mempengaruhi kebijakan serta perancangan perpolitikan di daerah sehingga pengaruh elit lokal mempunyai pengaruh yang mendominasi hampir disetiap lini kehidupan masyarakat di daerah. Hal tersebut dapat ditelaah dari aspek pembangunan, pengambilan keputusan politik dan pemilihan langsung kepala daerah. Dalam konteks pilkada elit-elit politik akan memaksimalkan usahanya untuk memperoleh kekuasaan karena itu yang menjadi orientasi politik. Sementara orientasi ideology, elit politik yang terjun ke gelanggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentaram, adil dan makmur.

2.6 Kerangka Pemikiran

Melihat pertarungan politik pada pelaksanaan Pemilu kabupatada Kabupaten Maluku Tenggara semua kandidat bakal calon kepala daerah telah mempersiapkan kekuatan politik dalam memenangkan pemilu kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Penelitian ini terfokus kepada kekuatan elit lokal tiga pasangan bakal calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang merupakan pelaku dalam sebuah sistem

politik dan merupakan orang-orang berhasil yang dianggap mampu memberi pengaruh dalam lapisan masyarakat.

Korelasi antara bakal calon dan kekuatan politik yang dimiliki oleh setiap pasangan bakal calon kepala daerah dan kemampuan menggunakan sumber pengaruh dengan menggunakan pendekatan kekuatan politik birokrasi, partai politik dan ekonomi untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.

2.7 Skema Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam bab ini memfokuskan pada enam bagian, yaitu: Tipe dan Dasar Penelitian, Lokasi Penelitian, Penetapan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data dan Teknik Analisis Data.

3.1. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis menggunakan pendekatan ini dalam menentukan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Selanjutnya untuk membahas hasil penelitian maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yakni menggambarkan sesuatu fenomena sosial dan menganalisis temuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 60 Tahun 1958.

3.3. Penetapan Informan

Penetapan informan/narasumber dalam penelitian ini menggunakan tehnik *non probability* dengan metode *purposive* yakni penulis menetapkan informan berdasarkan pengetahuan maupun keterlibatan mereka dalam permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi dan akurat.

Penulis dalam menentukan informan terlebih dahulu melakukan pengkategorian ruang lingkup dan memetakan menjadi 5 ruang lingkup satuan yang diteliti berasal dari:

1. bakal calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Tim pemenang bakal calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Unsur Partai politik;
4. Unsur pemerintah daerah;
5. Tokoh masyarakat;

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Pedoman wawancara berisi beberapa poin konsep kunci pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam menggunakan pedoman wawancara, penulis mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan/narasumber kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut berkembang mengikuti alur pembahasan.

Proses wawancara dilakukan di kediaman informan dengan suasana santai sehingga tercipta suasana yang akrab antara penulis dan informan. Suasana yang akrab membuat penulis lebih mudah untuk mendapatkan informasi karena informan tidak merasa tertekan dalam memberikan jawaban.

2. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang sumbernya dari buku-buku/literatur yang berkaitan dengan kekuatan politik bakal calon kepala daerah, karya-karya ilmiah yang relevan dalam penelitian ini atau referensi lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang terfokus pada kekuatan politik.

Melalui studi dokumen, penulis mengetahui deskripsi lokasi penelitian atau peristiwa-peristiwa masa lampau kelengkapan data penelitian. Dalam studi dokumen, penulis mengambil data yang berjenis dokumen-dokumen berupa arsip-arsip tertulis, laporan maupun gambar atau daya yang diekspos oleh penyelenggara pilkada dan Panwaslu Kab. Maluku Tenggara terkait Pilkada Kab. Maluku Tenggara. Selain penyelenggaraan Pilkada, penulis juga mengambil dari media cetak dan elektronik sehingga diperoleh data sekunder terkait dengan permasalahan penelitian.

3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian, sehingga data yang disajikan memberikan gambaran tentang objek penelitian secara utuh. Jenis data penelitian ini dikategorikan ke dalam dua kategori yang data primer dan data sekunder.

1. Data primer, diperoleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan informan/narasumber yang telah ditentukan.
2. Data sekunder, diperoleh dengan melakukna kajian pustaka yakni mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telaah tersedia dari buku, jurnal, media cetak atau elektronik, media online, serta

sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Bogdan menyatakan analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisa data kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus secara ilmiah.

Kegiatan analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan yang dilakukan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mereduksi data dari hasil wawancara yakni hasil wawancara yang telah direkam menggunakan alat perekam, headphone ataupun catatan tertulis dari penulis inventaris/dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan pembersihan data yang diperoleh dengan cara mendengarkan hasil rekaman dan membuat transkrip sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian transkrip tersebut dirapikan dan diperbaiki seperlunya agar menjadi teratur dan sistematis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis data kualitatif. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui yang disajikan, kita dapat melihat dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

Penyajian data penelitian ini dengan menempatkan data dari hasil wawancara dan hasil telaah pustak pada posisinya sesuai dengan kerangka hasil dan pembahasan yang disusun mengacu pada rumusan masalah yakni pemanfaatan kekuatan politik oleh bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data dari hasil wawancara. Makna-makna yang muncul dari data uji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dari kumpulan data dan informasi yang telah diolah dan dianalisis dari sumber data primer dan data sekunder dengan melihat pemanfaatan

kekuatan politik oleh bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas topik secara umum, yaitu gambaran umum Kabupaten Maluku Tenggara, Ibukota Langgur.

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah pemekaran baru yang awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak antara 50° 12' 19,427" sampai 60° 6' 18,275" Lintang Selatan dan 132° 0' 21' 39,082" sampai 133° 0' 15' 31,442" Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ±4.212,15 Km², dengan luas daratan ± 1.031,81 Km² dan luas perairannya ± 3.180,73 Km² Berdasarkan topografi, Pulau Kei Kecil dengan ketinggian ± 100M di atas permukaan laut. Beberapa bukit rendah di tengah dan utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 -800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

1. Penduduk dan Daftar Pemilih Tetap

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017

meningkat menjadi 99.284 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 48.724 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 50.560 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 96,22 jiwa/km².

Untuk melihat kondisi kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara Bisa dilihat dari Komposisi penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komposisi yang paling pokok, sebab kedua kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku demografi.

Selain itu kedua ciri ini pun mudah dikombinasikan dengan karakteristik sosial, ekonomi maupun geografis. Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong memiliki struktur umur produktif. Komposisi penduduk menurut umur bisa digunakan untuk menghitung angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Angka beban ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2017 adalah 68,66 persen artinya setiap 100 penduduk produktif harus menanggung usia penduduk tidak produktif antara 68 sampai 69 orang. Angka ketergantungan ini cukup tinggi hal tersebut karena jumlah penduduk muda atau usia 0-14 tahun yang cukup banyak yaitu 34.568 jiwa atau 34,82 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin bisa digunakan untuk melihat angka *sex ratio*. Angka *sex ratio* Kabupaten

Maluku Tenggara 2017 adalah sebesar 96,37 persen. Artinyadiantara 100 perempuan terdapat 96 laki-laki.³⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat sebanyak 73.017 orang. DPT 73.017 itu terbagi atas jenis kelamin laki-laki sebanyak 34.919 pemilih, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 38.098 pemilih.

Rincian jumlah pemilih pada 11 Kecamatan di Malra yakni Kecamatan Hoat Sorbay 6.256 pemilih, Kei Besar 11.295 pemilih, Kei Besar Selatan 4.081 pemilih, Kei Besar Selatan Barat 1.988 pemilih, Kei Besar Utara Barat 5.289 pemilih, Kei Besar Utara Timur 7.686 pemilih.

Selanjutnya, Kecamatan Kei Kecil 19.618 pemilih, Kei Kecil Barat 4.485 pemilih, Kei Kecil Timur 5.216 pemilih, Kei Kecil Timur Selatan 3.531 pemilih dan Kecamatan Manyeuw berjumlah 3.572 pemilih.³⁶

2. Pemerintahan

Sejak tahun 2015, jumlah kecamatan di Maluku Tenggara ada 11. Dari 11 kecamatan tersebut kecamatan Kei besar memiliki jumlah kecamatan terbanyak yaitu 37 kecamatan. Kecamatan dengan

³⁵ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Maluku Tenggara dalam Angka*, 2018. Hlm. 4.

³⁶ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara. Tahun 2018

jumlah desa paling sedikit adalah kecamatan manyeuw dengan jumlah desa 9.

Selama tahun 2017 belum ada pemekaran wilayah di kabupaten Maluku Tenggara baik desamaupun kecamatan. Jumlah desa/kelurahan yang cukup besar perlu didukung adanya aparat pemerintah dengan jumlah memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah Otonom di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 3.362 orang pada tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah PNS di kabupaten Maluku Tenggara dari 4.032

Pada tahun 2016. Penurunan tersebut mencapai 16,62 persen atau 670 jiwa. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pelimpahan pengawasan SMK dan SMA dari kabupaten ke provinsi. Sehingga PNS fungsional guru terdaftar sebagai PNS Provinsi.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar PNS di Maluku Tenggara berpendidikan S1/DIV atau 37,74 persen dari seluruh jumlah PNS yang ada di Maluku Tenggara. Sementara itu PNS dengan pendidikan terakhir SLTA ada 34,30 persen dari seluruh PNS yang ada di Maluku Tenggara.

Pada tahun 2017 masih ada PNS di Maluku Tenggara yang berpendidikan terakhir SD jumlahnya ada 15 orang. Sementara itu jumlah PNS yang berpendidikan S3 hanya ada 1 orang.

Jumlah aparat pemerintah yang banyak tentu pengeluaran pemerintah untuk pegawai juga besar. Berdasarkan realisasi APBD 2017, pengeluaran daerah Maluku Tenggara RP.991.021.986.296,78. Dari total pengeluaran tersebut 29,17 persen digunakan untuk belanja pegawai atau nilainya Rp.289.092.403.516 ,-. Sementara itu untuk belanja modal mencapai 25,42 persen dari total pengeluaran kabupaten Maluku Tenggara.³⁷

3. Pendidikan

Tingginya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bisa dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi Kasar (APK), dan angka melek huruf. APM adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APS adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sementara itu APK adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka Melek Huruf adalah jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis.

³⁷ Badan Pusat Statisti, *Op. Cit.* Hlm 3

Nilai APM di Maluku Tenggara tahun 2017 untuk SD adalah 97,81 persen atau dengan kata lain anak usia 7 sampai 12 tahun yang berpartisipasi duduk di bangku SD/MI ada 97,81 persen. Angka APM SMP 69,85 persen APM SMA 60,49 persen. Sementara itu nilai APS usia 7-12 tahun 99,98 persen artinya hampir semua penduduk berusia 7-12 bersekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat

Maluku Tenggara akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Nilai APS usia 16-18 tahun masih di bawah 90 persen atau 83,17 persen artinya masih ada 16,83 persen penduduk Maluku Tenggara usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Nilai APK SD di Maluku Tenggara mencapai 110,40 berarti siswasiswa SD di Maluku Tenggara masih ada yang berusia di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun.

Angka Melek Huruf di Maluku Tenggara cukup tinggi yaitu 99,32 persen artinya 99,32 persen penduduk Maluku Tenggara sudah bisa membaca dan menulis dan selebihnya buta huruf.³⁸

³⁸*ibid.* Hlm. 5

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam kekuatan bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, yaitu pemanfaatan kekuatan politik oleh bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.

5.1. Pemanfaatan Kekuatan Politik Oleh Bakal Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.

Pada pemilihan kepala daerah, dukungan sebagian besar masyarakat kepada calon atau kontestan tidak selalu mutlak karena faktor calon tersebut didukung oleh Partai walaupun sebahagian lainnya partai pengusung dianggap punya pengaruh sebagai mesin politik. Secara statistik kiprah majunya para bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah secara umum menunjukkan bahwa para bakal calon akan lebih mudah memenangkan pemilukada namun, figur calon juga berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Di era pemilihan langsung, populer dan elektabilitas memang menjadi bagian penting untuk terpilih menjadi kepala daerah. Kemenangan dalam Pemilukada, sangat bergantung pada kemampuan atau kekuatan politik calon yang diusung.

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem demokrasi turut juga mengalami dinamika politik dalam pemilihan bupati.

Jika dirincikan, maka jenis-jenis kekuatan politik ada delapan, yakni: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, aktor politik, media massa, organisasi keagamaan, birokrasi sipil dan militer. Kesemua jenis kekuatan politik tersebut sudah pernah mengisi sistem politik di Indonesia. Namun yang perlu digaris bawahi pada pembahasan ini penulis membatasinya pada kekuatan politik pendukung kemenangan yang dominan yakni birokrasi, sipil/adat, tokoh agama dan partai politik.

Penulis membatasi jenis kekuatan politik tersebut hanya beberapa saja yang kemudian dipahami dalam tesis ini merupakan acuan terhadap seorang kandidat mendapatkan dukungan dari salah satu daerah pemilihannya. Birokrasi, Partai politik sebagai partai pengusungnya, dan ekonomi untuk dapat dijadikan sebagai modal awal dalam membangun kekuatan politik yang kemudian diakomodir sedemikian rupa secara berkelanjutan agar masyarakat untuk memilih sang kandidat.

1. Pemanfaatan Elit Birokrasi

Bagian yang lain dari kekuatan politik partai politik adalah birokrasi yang memang memiliki akar sejarah yang tidak pernah terlepas dari pengaruh politik praktis. Sejarah birokrasi mencatat

bahwa kedudukan birokrasi terhadap sistem politik lokal dalam kasus ini pun juga terjadi di dalam Pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kabupaten Maluku Tenggara. Penguasaan politik jaringan pemerintahan lebih terfokus pada pengkondisian birokrasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara. Karena pengaruh salah satu bakal calon yang merupakan mantan sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga bisa mengkondisikan birokrat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Menurut Bapak Meko Rumte, yang juga salah satu ketua tim pemenangan bakal calon yakni,

“Bakal calon harus memiliki kekuatan dalam menduduki jabatan-jabatan yang strategis terutama dalam rekam jejak, karena hal ini akan dapat mempengaruhi popularitas bakal calon tertentu. Selain popularitas bakal calon juga harus mempunyai kemampuan personal dalam hal ini harus memahami birokrasi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, serta visi dan misi sehingga dapat memperkuat bakal calon Bupati. Selanjutnya ujar beliau kekuatan yang harus dimiliki bakal calon adalah kekuatan dua wilayah sehingga dapat mempengaruhi bakal calon.”

Hal yang bersifat kontradiktif mengenai pemanfaatan birokrasi yang dilakukan oleh pasangan bakal calon, Menurut salah satu pejabat pada lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, **Donatus Lutur**, mengatakan:

“Birokrasi tidak berperan aktif dalam calon kepala daerah. Beliau mengatakan bahwa birokrasi tidak berpolitik akan tetapi, kepentingan jabatan politik sehingga dapat

mempengaruhi orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Ujar beliau walaupun ada pejabat birokrasi yang berperan aktif untuk mendukung salah satu bakal calon yaitu karena memiliki hubungan emosional yang sangat kuat.

Berbagai pemilihan kepala daerah, posisi mantan birokrat selalu memiliki keuntungan ganda. Pertama, seorang mantan birokrat sudah jelas dalam berbagai kebijakan yang telah teruji dan dirasakan langsung. Seorang mantan birokrat mempunyai modal sosial karena selain pemangku kebijakan dia adalah sosok yang paling dikenal masyarakat lokal karena pernah menjadi bagian dalam kepemimpinan daerah yang juga menjadi salah satu daerah pemilihan. Orang mengenalnya dengan prestasi-prestasi, meski ada beberapa orang belum pernah melihat rupanya. Artinya, bukan lagi masalah dan itu berarti memperkecil ruang sosialisasi personal yang lebih besar. Meskipun dilakukan, itu hanya untuk memperbesar tingkat keterpilihannya di masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan kandidat yang lain yang tidak pernah menduduki jabatan sebagai birokrat, sebab untuk membuat dirinya dikenal masyarakat, maka dirinya mau tidak mau harus melakukan sosialisasi personal yang besar dan intens.

Menurut salah satu Ketua tim pemenang bakal calon Bupati.

Iron Dumatubun, beliau mengatakan bahwa:

“Pilkada langsung yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara hampir semua elemen berperan untuk

memenangkan bakal calon yang diusung. Beliau juga mengatakan bahwa kekuatan elite-elite baik itu elite Politik, elite Adat, tokoh-tokoh Masyarakat serta tokoh-tokoh Agama yaitu turut mempengaruhi kemenangan bakal calon. Beliau juga mengatakan selain peran elite politik, bakal calon juga harus di dukung dengan finansial yang cukup. Selanjutnya ujar beliau yang dimaksud dengan dukungan finansial ini bukan berarti untuk memaikan politik praktis akan tetapi, untuk mendukung sosialisasi dan kunsolidasi juga membutuhkan pendanaan yang cukup terutama untuk trasportasi. Selanjutnya beliau mengatakan faktor yang menentukan bakal calon yaitu strategi bakal calon Bupati maupun dari Ketua tim pemenang.

Dan beliau juga mengatakan ada pemilih rasional, pemilih tradisional dan juga pemilih transaksional. Beliau menjelaskan bahwa kalau pemilih rasional mereka lebih melihat visi dan misi bakal calon serta apa yang bisa dilakukan oleh kandidat ketika terpilih, dengan janji-janji kampanye pada saat calon tersebut mensosialisasikan diri dengan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pemilih tradisional yang memilih bakal calon yang memiliki hubungan emosional dengan bakal calon yakni, Agama, Suku, Ras, serta hubungan keluarga masih sangat kental. Sedangkan pemilih transaksional ujar beliau bahwa, untuk kategori ini mereka tidak peduli dengan isu-isu yang diangkat oleh aktor-aktor politik baik itu, Keluarga, Agama, Suku dan Ras karena mereka lebih mementingkan finansial.

Kondisi kedua, sebagai seorang yang berperan sebagai salah satu penentu kebijakan. Masyarakat akan mengenalnya sebagai seorang yang pernah berbuat untuk kepentingan masyarakat, meski soal berbuat untuk kepentingan masyarakat ini masih bisa diperdebatkan. Namun setidaknya, selama masa kepemimpinannya berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan. Dan tentu hal ini menjadi catatan bagi masyarakat tentang diri seorang mantan

birokrat terutama seberapa besar kebijakan dan program yang diimplementasikannya tersebut terhadap perkembangan masyarakat.

Kemudian kondisi ketiga, dari seorang mantan birokrat biasanya memiliki sumber daya yang cukup besar, materi, sebagai akumulasi dari kepemimpinannya selama ini birokrat juga memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elit dan masyarakat lokal dan menjadi modal sosialnya. Karena itu, tidaklah terlalu sulit bagi seorang mantan birokrat untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut.

2. Pemanfaatan Elit Partai Politik

Elit merupakan sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. Elit partai berpengaruh dalam pembentukan koalisi partai politik, seperti yang diungkapkan oleh Vilredo Pareto yang mempercayaimasyarakat diperintah oleh sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai kelebihan dan kualitas dalam bidang tertentu yang diperlukan dalamkekuatan sosial masyarakat itu sendiri.

Elit terdiri dari elit yang berkuasa dan tidak berkuasa, namun yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah elit yang berkuasa (governing elit), karena aspek inilah yang memiliki kekuasaan untuk menggabungkan kekuasaan dengantujuan yang lebih penting, elit yang berkuasa dimaksudkan adalah struktur partai dan kader partai. Dalam Pilkada elit bertindak sebagai penentu keputusan dengan

menggunakan kalkulasi tertentu. Pasangan M. Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin diusung oleh koalisi partai yakni, Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Eusebius Utah Safsafubun-Rahman Matdoan memanfaatkan koalisi, Partai Persatuan Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Demokrat dan Pasangan Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan memanfaatkan koalisi Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu tokoh pemuda yaitu **Daniel Rahantoknam**, Belaiu mengatakan bahwa:

“Elite parpol di daerah secara umum terbagi dua macam, terutama elite parpol yang berada di parlemen. Kedua elite parpol yang non parlemen alias sebagai pengurus partai sangat berpengaruh terhadap kemajuan efektifitas kerja partai politik. Elite parpol yang bertugas di parlemen harus menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat sehingga kepercayaan masyarakat pada parpol dapat di pulihkan kembali, jika kader partai di parlemen tidak bermutu maka wibawa partai akan menurun.”

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, ketiga bakal calon tidak menggunakan secara menyeluruh kekuatan partai politik, tetapi hanya menggunakan partai tersebut sebagai syarat dalam

pemilihan kepala daerah. Disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit partai politik baik sebagai elit partai politik aktif di parlemen maupun non parlemen/pertugas partai politik.

3. Pemanfaatan Modal Ekonomi

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Dalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Menurut Sahdan dan Haboddin, bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik.
2. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya.

3. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang.³⁹

Pasangan M. Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin, Pasangan Eusebius Utah Safsafubun-Rahman Matdoan dan Pasangan Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi dalam rangka menuju pilkada Kabupaten Maluku Tenggara adapun Modal ekonomi memiliki makna penting menjadi “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, modal ekonomi ini merupakan prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Salah satu pasangan calon yaitu Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan memiliki kekuatan modal ekonomi yang sangat mendukung pada pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. hal ini dikarenakan latar belakang wakil pasangan calon yaitu Hamza Rahayaan yang pada periode 2014-2019 menjadi wakil ketua DPRD kabupaten Maluku Tenggara. selama menjabat sebagai wakil ketua

³⁹ Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (editor). 2009. Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia, IPD, Yogyakarta. Hlm. 56.

DPRD kabupaten Maluku Tenggara, Hamza mampu membangun jaringan yang berdampak pada aspek ekonomi. Posisi strategis sebagai wakil ketua DPRD memberi kelebihan bagi Hmza Rahayaan dalam membangun jaringan dan relasi dengan pengusaha dan pihak-pihak lain yang mampu mendukung proses pencalonannya dari aspek ekonomi.

Salah satu tokoh adat, Bapak Nasir Teo Sedubun, berpendapat bahwa

isu Agama dan Kekuatan birokrasi serta finansial yang kuat sangat berpengaruh dalam mengusung bakal calon, akan tetapi beliau melihat bahwa ada salah satu bakal calon yang memang tidak terlalu cenderung ke kekuatan birokrasi, melaikan lebih membangun hubungan kekuatan melalui pendekatan sosial langsung ke masyarakat serta kedekatan kekeluargaan, hal ini sudah dilakukan oleh salah satu bakal calon selama menduduki jabatan di pemerintahan, secara tidak langsung dari rekam jejak tersebut sudah memiliki kekuatan politik.

Dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada

mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan.

5.2. Pemanfaatan Kekuatan Politik dengan Orientasi Kelompok Kepentingan

Pada pembahasan sebelumnya, diuraikan bahwa kekuatan-kekuatan politik mencakup delapan hal yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, aktor politik, media massa, organisasi keagamaan, birokrasi sipil dan militer. Selain tiga kekuatan utama yang diuraikan sebelumnya yaitu elit birokrasi, elit partai politik dan elit ekonomi terdapat kekuatan lain yang mampu dimanfaatkan oleh bakal calon dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara, yaitu kelompok kepentingan yang terdiri atas kelompok / organisasi adat dan kelompok/organisasi keagamaan.

Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan adalah pada cara dan sasaran dalam mencapai tujuan. Kelompok kepentingan mementingkan bagaimana mereka memfokuskan diri pada suatu isu atau kepentingan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang lebih lama sedangkan kelompok penekan lebih bersifat sementara.

kelompok penekan berusaha untuk mengelompokkan diri di dalam suatu tujuan tertentu dan setelah itu bubar atau secara khusus berusaha untuk memengaruhi/menekan pejabat pemerintah untuk menyetujui pemikiran/tujuan mereka. Dapat pula disederhakan dengan suatu ungkapan bahwa kelompok penekan akan terus berusaha untuk mengeluarkan tekanan terhadap pihak yang sedang berkuasa di pemerintahan (*Duverger, 1984*). Kelompok penekan sebenarnya tidak sebesar dan sesolid partai politik, tapi radikalisme yang dikembangkan membuat kelompok penekan ini terlihat lebih menonjol dari partai politik dan seringkali membuat mereka mendapat tempat di hati masyarakat sehingga akan semakin eksis bila negara gagal menghadirkan kebahagiaan dan keadilan sosial. Kepentingan yang dibawa kelompok penekan ini sangat luas definisinya. Terdapat beberapa tipe kelompok penekan. Tipe tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- **Kelompok Bisnis.**

Ada dua kelompok penekan bisnis. Kelompok *pertama* adalah kelompok yang tujuannya adalah berbicara untuk kepentingan bisnis secara keseluruhan daripada untuk industri tertentu. kelompok bisnis yang berusaha memperjuangkan pajak yang harus mereka bayarkan serendah mungkin, meminta subsidi dari pemerintah, dan melindungi mereka dari kompetisi yang tidak

sehat. Kelompok kedua adalah kelompok yang berbicara untuk industri tertentu dan terkadang berkonflik ama bisnis seperti halnya dengan buruh dan konsumen mereka. Kelompok Buruh. Kelompok penekan buruh kelompok yang memperjuangkan aspirasi buruh berkaitan engan upah terhadap pembuatan kondisi bekerja, kontrol kebijakan industri.

- **Kelompok Pertanian.**

Seperti halnya kelompok penekan kelompok penekan pertanian juga memiliki dua tipe yaitu kelompok penekan yang memperjuangkan pertanian bisnis, secara keseluruhan dan kelompok penekan yang menyuarakan kebijakan khusus seperti jaminan harga jual barang pertanian, petani domestik dari kompetisi dengan usaha asing, dan subsidi pemerintah untuk pertanian.

- **Kelompok Profesional.**

Kelompok profesi seperti dokter, pengacara, arsitek, dan dosen juga termasuk ke dalam kelompok penekan yang mengorganisasikan kelompok penekan untuk mempertahankan dan mempromosikan kepentingan ekonomi dan kepentingan mereka yang lain.

- **Kelompok Veteran.**

Kelompok penekan veteran adalah kelompok penekan yang biasa

memperjuangkan kepentingan mereka, seperti tuntutan pemberian pensiun yang besar dari pemerintah kepada kalangan mereka.

- **Kelompok Keagamaan.**

Kelompok penekan keagamaan biasanya kelompok yang memberi perhatian besar terhadap isu politik seperti aturan keagamaan di sekolah, aturan tentang buruh dan penyebaran informasi mengenai kontrol angka kelahiran dan hal-hal keagamaan lainnya

- **Kelompok etnis.**

kelompok penekan etnis lazimnya kelompok etnis tertentu yang minoritas yang menekan pemerintah dikarenakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang kurang menjamin dan melindungi keberadaan mereka.

- **Kelompok reformasi.**

Kelompok penekan reformasi ialah kelompok penekan yang lintas afiliasi seperti ekonomi, pekerjaan, keagamaan, dan etnis yang menekankan adopsi aneka ragam reformasi pemerintahan. Kepentingan golongan tertentu.

namun, pada pembahasan penelitian ini tidak akan membahas keseluruhan kelompok penekan yang diuraikan di atas, namun penelitian ini fokus pada kelompok etnis yang mencakup kelompok adat dan kelompok keagamaan.

5.2.1. Kelompok Adat

Budaya Siwalima merupakan basis pemikiran kebudayaan masyarakat Maluku yang dijadikan sebagai perspektif budaya dari proses pembangunan di Maluku. alasan-alasan dasar mengapa basis pemikiran budaya ini menjadi penting sebagai sebuah cara pandang pembangunan Maluku. Ketika banyak pihak mengamanatkan pentingnya kearifan lokal sebagai kekuatan membangun karakter manusia; maka pembangunan sebagai salah satu instrumen pembentukan karakter manusia mesti pula didesain secara cermat dengan bertumpu pada kearifan lokal.

Budaya Siwalima bukanlah penggunaan suatu unsur kearifan lokal untuk mengisi suatu agenda global/universal. Ibarat mengisi air ke dalam sebuah gelas. Budaya Siwalima adalah 'gelas' itu sendiri; artinya budaya itu menjadi wadah dan wahana untuk mengkonsolidasi segala hal. Sebab itu dalam strategi pembangunan, budaya Siwalima merupakan paradigma yang darinya kita memandang serta mengembangkan pembangunan dan pemerintahan di Maluku.

Di dalam paradigma Siwalima, pembangunan Maluku adalah sebuah proses dialektika dan dialogis. Proses dialektika artinya pembangunan harus dapat membangun sebuah sintesa antara kebutuhan rakyat, harapan rakyat dan cita-cita daerah ke dalam

bentuk program-program konkrit. Hak-hak masyarakat adat pengetahuan lokal dan segala kekayaan alam yang ada mesti dikelola dengan tetap menjaga keutuhan hidup masyarakat adat, menghormati pranata-pranata sosial mereka, dan memelihara integrasi negeri-negeri yang adalah satuan sosio-genealogis proses-proses dialektika itu berlangsung melalui konektivitas yang kuat di antara institusi pemerintahan mulai dari level paling bawah.

Proses dialogis dimaksudkan agar proses-proses komunikasi antarmasyarakat, dengan institusi pemerintahan bisa berlangsung secara efektif. Dalam budaya Siwalima komunikasi merupakan salah satu usaha meningkatkan kohesifitas masyarakat. Ada hubungan yang mutual di antara tiap unsur atau elemen sosial, dan hubungan itu bertendensi pada perdamaian, persaudaraan, tanggungjawab, tetapi juga kesetiaan untuk menaati perjanjian yang telah disepakati.

Paradigma Siwalima dalam pemerintahan mengasumsikan perlunya pemerintah yang bersih dalam arti jujur, bertanggungjawab, dekat dengan rakyat (dalam semangat hidup orang basudara) atau apa yang sejak awal disebut pemerintahan yang demokratis (*democratic government*). Secara kultural, negeri-negeri, aman, hena, ohoi, di Maluku adalah satuan demokrasi kultural yang kuat. Kekerabatan yang terlembaga dalam ikatan soa dan selanjutnya terjelma dalam Saniri sebagai bentuk kolektifitas pemerintahan

mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah di Maluku perlu dibangun dalam mekanisme-mekanisme 'hidop orang basudara'.

Pemerintahan yang kuat dan dipercaya rakyat adalah pemerintahan yang mampu menjaga kohesifitas sosial dan mendorong proses-proses 'masohi, badati, maano, hamaren'yakni mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Tingkat partisipasi yang tinggi adalah wujud dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Karena itu paradigma Siwalima harus dapat membentuk watak atau keteladanan seorang pemimpin di dalam masyarakat. Orang Maluku selama ini belajar dari pemimpin yang berkharisma. Itulah sebabnya mengapa raja-raja adalah tokoh-tokoh kharismatik yang begitu dihormati oleh masyarakat adat. Mengapa lembaga Saniri Negeri Adat begitu berwibawa. Pemimpin yang berkharisma SIWALIMA adalah pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, mau berkorban, mampu membela kepentingan rakyat, menjaga keutuhan dan perdamaian, melindungi hak-hak daerah dan hak rakyat.

Setelah terbentuknya hukum larwul ngabal dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat di kepulauan Kei, dimana pememimpin yang tertinggi dipegang oleh seorang rat (raja) yang memiliki daerah kekuasaan meliputi beberapa ohoi yang dipimpin oleh seorang

halaaai. Pada fase ini tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang telah teratur serta memiliki rasa solid yang tinggi terhadap orang lain. Prilaku hidup yang menghargai hak-hak kemanusiaan orang lain menjadi realitas yang terwujud dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam prilaku hidup masyarakat ketetapan-ketetapan hukum larwal ngabal menjadi rujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan lebih baik. Masuknya bangsa Eropa di Kepulauan Kei memberikan dampak yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Kei pada umumnya dikenal dengan istilah sistim kasta yang dikelompokkan pada tiga kelompok kasta yaitu:

1. Golongan Mel-mel
2. Golonngan Ren-ren
3. Golongan Ri-ri

Pengelompokan dalam sistim kasta ini dengan sendirinya memberikan status sosial pada masing-masing kelompok yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Golongan Mel-Mel

Merupakan golongan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari golongan yang lain. Golongan ini biasanya diidentikan dengan pohon beringin yang tinggi, besar dan lebat serta memiliki

dahan, ranting daun, bunga dan buah. Yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dari panas dan hujan serta memberikan makanan kepada burung-burung yang hinggap. Golongan ini tidak seluruhnya diberikan kekuasaan untuk memimpin, hanya kepada mereka yang dianggap sebagai kepala atau ketua dalam kelompoknya. Oleh karenanya itu golongan atau kasta ini memiliki sub-sub kasta (golongan) antara lain:

- a. Mel Nuhu Duan, adalah gelaran strata bangsawan dari penduduk asli.
- b. Mel Bal Sumbau, adalah gelar strata bangsawan penduduk pendatang dari Bali, Jawa, dan Sumbawa.
- c. Mel Delo Ternat, adalah gelar strata bangsawan penduduk Ternate, Tidore, dan Jailolo.
- d. Mel Luang Mobes, adalah gelar strata bangsawan penduduk pendatang dari Luang Mobes.
- e. Mel-Mel Seran Ngoran Wadan Lair, adalah gelar strata bangsawan penduduk pendatang dari Seram, Banda, dan Pulau-Pulau Watubela.

Selanjutnya strata Mel-Mel mempunyai nama berdasarkan fungsi atau pembawaannya yakni ada tujuh:

- a. Mel Uun Ohoi Koran, adalah strata bangsawan yang mempunyai pembawaan berbudi bahasa yang baik dan bijak.

- b. Mel Kaba Ainar, adalah strata bangsawan yang mempunyai pembawaan berkebesaran, cantik dan bagus.
- c. Mel Kasil Vut Vut adalah strata bangsawan yang berfungsi memahami sepuluh mata rumah.
- d. Mel Kasil Memehean adalah strata bangsawan yang dimiliki oleh hanya satu orang dalam satu desa tersebut
- e. Mel Ohoi Ratut adalah strata bangsawan yang banyak orang memilikinya dalam satu desa.
- f. Mel Yam'a (Yaman Aan) adalah strata bangsawan yang berstatus tetua adat.
- g. Mel Kak Watan Mu'ur Bong dan Ahli Kaneuw adalah strata bangsawan

b. Golongan Ren-ren

Strata sosial kedua ini diibaratkan sebagai pohon atau ibu (Ren adalah asal kata Renan-ibu) dan Ren diibaratkan sebagai induk pohon yang dinamakan strata social Mel yang diibaratkan sebagai pohon beringin tumbuh dan berkembang di situ sehingga menjadi besar dan rindang untuk tempat berlindung bagi setiap makhluk. Ren-Ren atau Ri-Ri mendapat nama julukan: Ren Kerbau Wuar. Tidak terdapat sub-Kasta pada mereka. Disebut kerba karena berdiam dan Berkuasa di gunung (Kerbauw disamakan dengan Kerbau gunung) Golongan

dalam strata menengah ini adalah penduduk asli. Mereka, adalah yang pertama kali tiba disuatu wilayah. Penduduk asli ini dianggap sebagai pemilik atau penguasa di daerah, dan mereka dapat di katakan sebagai induk (Ren) dan suatu masyarakat Ren biasanya berkedudukan sebagai Tuan Tanah dan juga dapat bersama-sama dengan mereka menjalankan roda pemerintahan. Golongan Ren-Ren ini diungkapkan masyarakat ibarat batang pohon atau induk sebua pohon yang dari padanya hidup bagian atasnya yaitu golongan Mel-Mel. Jika batang pohon dan akarnya tidak kuat maka serangan angin dapat menumbangkan pohon tersebut. demikianlah kekuatan Mel atau golongan atas itu terletak pada golongan Ren-Ren yang dianggap sebagai saudaranya.

Pada mulanya Ren yang hidup dipegunungan atau pedalaman dan mereka disebut sebagai Ren Kerbau Vuar artinya kekuatan seperti tenaga kerbau yang mampu mengolah/membajak tanah, menebas hutan dan berjalan turun naik gunung dan bukit. Pada umumnya mereka lebih menguasai keadaan daratan Pulau Kei. Dengan demikian kekuatan golongan Mel terletak pada dukungan Ren- Ren. Meskipun golongan Ren-Ren tidak terbagi atas su-sub kasta, namun masyarakat mengenal beberapa macam Roh sehubungan dengan tempat asal dan pengabdianya kepada golongan Mel-Mel antara lain:

1. Ren Kerbau Vuar, yaitu sebutan bagi REN-Ren pada umumnya.
2. Ren Kerbau Hungar Nar-Nar, yaitu sebutan bagi Ren yang berani dan lihai dan segia besar berasal dari pulau Kur.
3. Ren Bardik, yaitu Ren yang mengatur dirinya sendiri dan kekuatan dipercayakan kepada mereka karena alasannya Mel telah punah atau berpindah tempat.
4. Ren Kerbau Memehan, yaitu sebutan bagi Ren yang tinggal bersama satu negeri(des).)
5. Ren Kerbau Siram Jatak, yaitu sebutan bagi Ren yang berda di bawa naungan Mel-Mel.

c. Golongan Ri-ri

Kata “Ri” berarti “Akar”, yang dihubungkan dengan pohon dimana akarnya mencari zat makanan untuk pohonnya. Jadi RI atau Iri-Ri dapat dihubungkan dengan orang-orang yang harus bekerja untuk tuannya, artinya mereka ini dapat dipahami sebagai akar yang mencari makanan untuk pohonnya untuk itu Ri dapat dikatakan sebagai golongan yang mengabdikan diri pada Tuannya. Mereka ini dapat di pandang sebagai golongan yang kurang diindakan sebab dalamkehidupannya mereka tidak bebas sepenuhnya dan harus bekerja keras untuk atas annya yaitu golongan Ren-Ren atau Mel-Mel.

Staratifikasi yang berlaku di masyarakat Kei tidak mutlak ketat, sebab masih terdapat perbedaan-perbedaan antara satu kampung dengan kampung yang lain bahkan antara satu golongan dengan golongan kasta dengan kasta yang lain. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa para pendatang adalah semua orang yang pandai dan penduduk asli adalah orang yang dapat diperdaya atau mudah dikuasai. Hal ini disebabkan karena para pendatang pun belum tentu termasuk golongan Mel- Mel. Selanjutnya tidak dapat dikatakan bahwa semua Mel adalah penguasah dan semua Ren berada di bawah Mel. Demikian juga tidak semua Ri adalah orang yang harus mengabdikan diri Ren dan Mel karena dalam golongan Iri-Ri ada yang berdiri sendiri yaitu kelompok Iri Bordik. Mereka ini tidak diperhamba atau diperbudak oleh atasannya akan tetapi mereka tahu akan kewajiban dan tetap setia melaksanakan tugasnya kepada golongan Ren-Ren maupun Mel-Mel.

Ketiga golongan masyarakat Kei tersebut di atas dalam kehidupannya terikat pada ketentuan-ketentuan adat yang telah diatur dalam hukum adat Larwul Ngabal yang selama ini diwarisi secara turun-temurun.

Pemanfaatan kelompok adat menjadi kekuatan oleh ketiga bakal calon menurut penulis bahwa ada kecenderungan dijadikan

sebagai kelompok penekan, sebagaimana yang diungkapkan Miriam Budiarjo bahwa Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Peran kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (*pressure forces*), tetapi juga kendali sosial (*social control*), pendidikan politik (*political education*) dan pembangunan kesadaran (*awareness building aspect*). kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa (pemerintah) agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Atau, dapat juga didefinisikan sebagai " *association of individual or organisations that on the basis of one or more shared concerns, attempt to influence public policy in its favour usually by lobbying members of the government*" (sekumpulan individu dan atau organisasi yang memiliki dasar dari satu atau lebih kepentingan bersama yang

berupaya untuk memengaruhi pandangan umum menurut kepentingannya dengan anggota pelobi di dalam pemerintahan).

Jenis kelompok penekan (*pressure group*) di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis kelompok penekan, berdasarkan gerak perjuangannya, yaitu :

1. Bentuk perjuangan kelompok penekan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi dan sosial dan berbasiskan pada swadaya murni organisasi.
2. Bentuk kelompok penekan yang mengemas kepentingan kelompok menjadi kepentingan-kepentingan penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi.
3. Bentuk kelompok penekan yang tidak memiliki arah perjuangan yang konsisten, dan hanya bersifat berada dalam waktu yang temporer sehingga visi dan misinya secara praktis berubah-ubah.

Setiap pribadi maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus dicapai dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, ataupun Negara. Dalam rangka mencapai dan mempertahankan kepentingan ini, tentu saja memerlukan kerjakeras perjuangan, yang semuanya harus bersentuhan dengan individu atau masyarakat maupunyai yang lebih luas lagi yaitu Negara dan pihak Internasional. Untuk semua itu memerlukan kekuatan dan dukungan dari semua pihak, sehingga memperoleh tanggapan yang serius dari

masyarakat atau pihak tertentu yang menjadi tujuan dari kepentingan tersebut. Bentuk kekuatan yang memiliki daya dukung tersebut adalah kekuatan yang didalamnya berisi dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama juga. Bentuk kekuatan tersebut disebut juga dengan organisasi yang berdiri dan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan organisasi lainnya. Hal yang melatarbelakangi lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu, masyarakat, Negara, dan Negara lain yang memiliki kekuatan yang besar terhadap individu, masyarakat, Negara, dan Negara lain yang lemah (terbelakang, baru, berkembang). Dan Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara

langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat. Dengan beranggapan bahwa suara satu orang (misalnya dalam pemilihan umum) sangat kecil pengaruhnya, terutama dinegara negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabung diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Dalam aktivitasnya menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran yang monolitik dan intensitas usaha yang tidak berlebihan serta mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik di luar tugas partai politik. Dalam pendapat Gabriel Almond, setiap sistem politik haruslah memiliki fungsi dan struktur politik tertentu. Fungsi politik ialah fungsi input dan fungsi output. Dalam masyarakat politik modern terdapat struktur±struktur politik, salah-satunya adalah kelompok kepentingan. Suatu Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui

kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama.

i. Kelompok Keagamaan

Penjelasan menurut Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Dalam penelitian ini, kelompok keagamaan merupakan termasuk pada kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Maluku Tenggara. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik, sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat, serta kekuasaan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah sebagai sarana untuk memperjuangkan alternative kebijakan umum menjadi keputusan politik. Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok :

a. Interest Group Asosiasi

Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih

mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhammadiyah, Kadin, SPSI, dll

b. *Interest Group Institusional*

Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya.

c. *Interest Group Nonasosiasi*

Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll.

d. *Interest Group Anomik*

Interest group ini dapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak mengeluarkan pendapat dimuka

umum. Kelompok keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini tergolong dalam jenis kelompok *interest group asosiation*.

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Berdasarkan pada data statistik provinsi Maluku, diketahui jumlah penduduk yang memeluk agama katolik berjumlah 60.287 jiwa, pemeluk agama islam 45.646 jiwa dan pemeluk agama protestan 27.544⁴⁰, maka di kabupaten Maluku Tenggara terdapat tiga agama yang dominan diyakini oleh masyarakat. Kelompok kepentingan yang memiliki latar belakang berdasar pada agama di dominasi oleh agama Katolik. Meskipun tidak ada kelompok yang secara terbuka menyatakan sebagai organisasi keagamaan katolik, namun organisasi agama katolik dibawah oleh Organisasi kegerejaan masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa peran tokoh agama menjadi hal yang penting dalam menentukan kekuatan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. hal ini dibuktikan dengan wawancara berikut:

“semua elemen ikut berperan dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. apalagi kelompok agama dan adat. Tokoh agama dan tokoh adat mengambil peran dan semua pasangan calon menyadari bahwa kekuatan dari adat dan agama sangat berperan untuk mendukung kemenangan masing-masing pasangan calon.”⁴¹

⁴⁰ Maluku.kemenag.go.id/halaman/pemeluk-agama diakses pada hari minggu 4 Agustus 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Iron Dumatubun.

Peranan kelompok kepentingan

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik. Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka.

Gabriel A. Almond memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam

pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan. ⁴²Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.

⁴²Eddi Wibowo dkk. Ilmu Politik Kontemporer. (Yogyakarta:YPAPI, 2004) hlm 69

Sifat lembaga ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Independen Yaitu bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sarana dan lain sebagainya dilakukan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain.
- b) Netral Yaitu bahwa dalam menjalankan eksistensinya, tidak tergantung pihak lain.
- c) Krisis Yaitu bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan analisi yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisi yang shahih.
- d) Mandiri Yaitu bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Adapun tujuan dari pembentukan kelompok kepentingan adalah sebagai berikut :

- a) Untuk melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan dari pemerintah atau Negara.
- b) Untuk menjadi wadah dalam pemberdayaan masyarakat dan kehidupannya.
- c) Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah dan Negara
- d) Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek ±aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan. Saluran

untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luas dan efektifnya tuntutan kelompok kepentingan. Saluran artikulasi yang paling penting adalah sebagai berikut :

- a. Demonstrasi dan Tindakan Kekerasan Merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak digunakan oleh kelompok anomik.
- b. Hubungan Pribadi Merupakan salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan, sebagai perantara kepada elit politik.
- c. Perwakilan Langsung Sarana ini bersifat resmi, seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta lembaga resmi lainnya.
- d. Saluran Formal dan Institusional Lainnya Sarana ini meliputi media masa cetak, elektronik, televisi (formal) dan partai politik (institusional) lainnya.

Kelompok kepentingan diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sesuai dengan berbagai patokan. Misalnya menurut jenis kegiatan dikenal dengan berbagai macam kelompok kepentingan seperti: profesi, okupasi, keagamaan, kegemaran, lingkungan .hidup, kepemudaan, dan kewanitaan, adapun kepentingan berdasarkan lingkungan kepentingan yang diartikulasikan dikenal adanya kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan yang terbatas, seperti: petani, guru, buruh,

dan pegawai negeri; tetapi ada pula kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan yang berlingkup luas seperti lembaga bantuan hukum dan lembaga konsumen. Kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda jenisnya, antara lain: dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama atau pun berdasarkan issue-issue kebijakan, kelompok-kelompok kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi, terutama karena kehidupan sehari-hari dan karier seseoranglah yang paling cepat dan yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan pemerintah. Gabriel Almond dalam *Interest Group and Interest Articulation*-nya (Boston: LittleBrown and Company, 1974) dan Bingham Powell (1978) menyebutkan setidaknya ada empat kelompok kepentingan dalam kehidupan politik, yaitu :

a) Kelompok Anomik

Kelompok ini terbentuk dalam unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur. Kelompok kepentingan ini dapat terjadi secara

mendadak dan tidak bernama. Dan, karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan seterusnya.

Sehingga, apa yang dianggap sebagai kelompok anomik ini mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisasi yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan. Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Kelompok ini memiliki identitas yang tidak jelas.

b) Kelompok Non-Assosiasional

Berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan tidak secara kontinyu. Jarang terorganisir secara rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala. Kelompok kepentingan ini tidak didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur atau berkesinambungan, tetapi aktivitasnya hanya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat sekelurahan (trah Jawa), masyarakat seasal pendidikan,

masyarakat paguyuban, masyarakat patembayan, dsb. Secara teoretis, kegiatan kelompok non-asosiasional ini terutama merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan kelompok kepentingan yang terorganisasi dan fokus tidak ada atau masih lemah.

Tetapi dalam Negara-negara industri maju pun, kelompok non-assosiasional seperti keluarga-keluarga berpengaruh, tokoh-tokoh local atau regional, dan pamimpin-pemimpin agama seringkali menerapkan pengaruh yang walaupun kadang kala lebih besar dari pada pengaruh perkumpulan professional serikat buruh,dan sebagainya.

c) Kelompok Institusional

Kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain disamping artikulasi kepentingan. Kelompok kepentingan tersebut pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan..Karenanya organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif,militer, birokrasi, dan ormas-ormas keagamaan sering kali mendukung kelompok ini ataumemiliki anggota-anggota yang

khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobi. Sebagai kelompok yang formal seperti itu, kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.

Jika kelompok institusional ini sangat berpengaruh, biasanya akibat dari basis organisasinya yang kuat. Tetapi baik sebagai badan hukum maupun sebagai kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum itu (seperti fraksi-fraksi badan legislative, klik-klik di level perwira militer, klik-klik departemen, dan klik-klik ideologis dalam birokrasi) kelompok semacam ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Misalnya Dharma Wanita, KORPRI, dan organisasi profesi lainnya

d) Kelompok Assosiasional

Kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga profesional, dan memiliki prosedur baku untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Kelompok kepentingan khusus yang didirikan memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau dari golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini adalah ormas. Kelompok khusus ini memakai tenaga profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk

memutuskan kepentingan dan tuntutan. Kelompok meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok kepentingan asosional bila diizinkan berkembang cenderung untuk menentukan perkembangan dari jenis-jenis kelompok kepentingan yang lain.

Kelompok kepentingan yang berdasar pada adat dan agama menjadi kekuatan politik yang berpengaruh pada pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran yang penting dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan kekuatan politik pada masing-masing bakal calon dalam pemilihan kepala daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan pendekatan birokrasi merupakan salah satu unsur untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu bakal calon karena melihat kebijakan dan kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat, sedangkan pemanfaatan partai politik tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masing-masing bakal calon karena kinerja anggota DPR yang merupakan interpretasi dari partai politik kurang memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat. Pemanfaatan kekuatan dalam masing-masing bakal calon sebagai tokoh adat dan tokoh agama digunakan terbatas karena untuk mencegah konflik ditengah-tengah masyarakat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengajukan saran agar para bakal calon diharapkan memahami dan mempelajari regulasi pemilihan kepala daerah, sehingga dalam pemanfaatan kekuatan politik tidak disertai dengan pelanggaran regulasi

sehingga dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Penggunaan kekuatan politik pada aspek tokoh adat dan agama diharapkan setiap bakal calon tetap menjaga agar konflik horisontal masyarakat tidak terjadi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Abdulkahar, Badjuri. (2007). Kebijakan Publik, Konsep dan Strategis, Semarang: Universitas Diponegro Press.
- Agusyanto, Rudi. (2007). Jaringan Sosial Dalam Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. (2006 Edisi Revisi VI). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrain, Charles F. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1992.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Onong Uchjana. Kepemimpinan dan Komunikasi. Bandung: Mandra Maju. 1992.
- Halim, Abdul, 2014. POLITIK LOKAL, Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya, Yogyakarta, LP2B.
- Hayati, Sri., dan Ahmad Yani. Geografi Politik. Bandung: Refika Aditama. 2007 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mulyana, Dedy. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marijan, Kacung (2006). Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung. Pustaka Eureka, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Maran, Rafael.Raga.(2007). Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Romli, Lili, Taftazani. Demokrasi Lokal dan Pilkada. Jurnal Demokrasi dan HAM. 2006.

- Rudini, H. Atas Nama Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. 1994.
- Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sanit, Arbi. Reformasi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Siagian, Sondang P. Peranan Staf Dalam Manajemen. Jakarta: Gunung Agung. 1985.
- Supriyanto. Peraturan Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Pustaka Mina. 2008.
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. 1992.
- Sy, Pahmi. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Upe, Ambo. Sosiologi Politik Kontemporer, Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2008.

Sumber dari internet :

[http://www.kabartimur.co.id/detail/indeks/tenggara-roya/12999-Pilkada-Malra Survei Resubun-Tertinggi..](http://www.kabartimur.co.id/detail/indeks/tenggara-roya/12999-Pilkada-Malra%20Survei%20Resubun-Tertinggi..)

<http://www.mrsbedahnusantara.com/2017/08/hasil-survey-mrs-bedah-nusantara-nama.html>

LAMPIRAN

Dokumentasi dan Wawancara Kepada Narasumber



Gambar 1 : Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Angelius Renyaan dan Hamzah Rahayaan (AMANAH)



Gambar 2 : Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Eusabius Utah Safsafubun dan Rahman Matdoan (UTAMA)



Gambar 3 : Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun dan Petrus Beruatwarin (MTH-PB)



Gambar 4 : Wawancara antara Penulis kepada Narasumber bernama Meki Rumte



Gambar 5 : Wawancara antara Penulis kepada Narasumber bernama Ironimus Dumatubun



Gambar 6 : Wawancara antara Penulis kepada Narasumber yang merupakan salah satu tokoh masyarakat.